

**SOSIALISASI WAWASAN KEBANGSAAN SEBAGAI UPAYA PENGUATAN NILAI-NILAI EMPAT KONSENSUS NASIONAL BERSAMA ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

***SOCIALIZATION OF NATIONAL INSIGHT AS AN EFFORT TO STRENGTHEN THE VALUES OF THE FOUR NATIONAL CONSENSUS WITH MEMBERS OF THE DPRD OF EAST KALIMANTAN PROVINCE***

**Ramdanil Mubarok<sup>a</sup>**

Program Studi Pendidikan Agama Islam, STAI Sangatta Kutai Timur

[dani.education@gmail.com](mailto:dani.education@gmail.com)

**Siti Munfiatik<sup>b</sup>**

Program Studi Pendidikan Agama Islam, STAI Sangatta Kutai Timur

[sitimunfiatik1983@gmail.com](mailto:sitimunfiatik1983@gmail.com)

**Eka Widyanti<sup>c</sup>**

Program Studi Pendidikan Agama Islam, STAI Sangatta Kutai Timur

[ekawidyanti619@gmail.com](mailto:ekawidyanti619@gmail.com)

**Siti Nur Hasanah<sup>d</sup>**

Program Studi Pendidikan Agama Islam, STAI Sangatta Kutai Timur

[snhasanah1379@gmail.com](mailto:snhasanah1379@gmail.com)

**Abstrak**

Sosialisasi wawasan kebangsaan sebagai upaya penguatan nilai-nilai Empat Konsensus Nasional bersama anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur sangat relevan dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di tengah keberagaman yang ada di Kalimantan Timur dan Indonesia. Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dilaksanakan pada hari Minggu, 17 November 2024, di Agra Rasa (Eks. Mesfa Mulia), Jln. Yos Sudarso 3, RT.2, Teluk Lingga, Sangatta, Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Acara ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya empat konsensus kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kegiatan ini menghadirkan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, tokoh masyarakat, serta akademisi yang memberikan materi terkait wawasan kebangsaan, serta tantangan dan solusi dalam implementasinya di kehidupan sehari-hari. Diskusi tanya jawab menjadi ajang bagi peserta untuk mengungkapkan pertanyaan dan pandangan mengenai kendala yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai kebangsaan. Dengan tujuan memperkuat rasa nasionalisme, acara ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga persatuan, keberagaman, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tercipta masyarakat yang lebih harmonis, sejahtera, dan berwawasan kebangsaan yang tinggi.

**Kata kunci:** Sosialisasi, Wawasan Kebangsaan, Nilai-Nilai, Konsensus Nasional

### **Abstract**

*The socialization of national insight as an effort to strengthen the values of the Four National Consensus together with members of the DPRD of East Kalimantan Province is very relevant in strengthening national unity and unity, especially amidst the diversity that exists in East Kalimantan and Indonesia. The National Insight Socialization was held on Sunday, November 17 2024, at Agra Rasa (Ex. Mesfa Mulia), Jln. Yos Sudarso 3, RT.2, Teluk Lingga, Sangatta, East Kutai, East Kalimantan Province. This event aims to strengthen public understanding of the importance of the four national consensuses, namely Pancasila, the 1945 Constitution, the Republic of Indonesia, and Bhinneka Tunggal Ika. This activity presented members of the East Kalimantan Province DPRD, community leaders, and academics who provided material related to national insight, as well as challenges and solutions in its implementation in everyday life. The question and answer discussion became an opportunity for participants to express questions and views regarding the obstacles faced in implementing national values. With the aim of strengthening the sense of nationalism, this event is expected to increase public awareness in maintaining the unity, diversity and integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia, so as to create a society that is more harmonious, prosperous and has a high national outlook.*

**Keywords:** Socialization, National Insight, Values, National Consensus

#### **A. PENDAHULUAN**

Wawasan kebangsaan merupakan salah satu elemen penting dalam konteks kebhinekaan yang dimiliki bangsa Indonesia (Karimullah, 2021). Wawasan kebangsaan tidak hanya berfungsi sebagai pengetahuan tentang negara, tetapi juga sebagai sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa cinta tanah air, kesetiaan terhadap negara, dan penghargaan terhadap keragaman budaya (Muzakkir & Dani, 2020). Wawasan kebangsaan merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks pemerintahan, wawasan kebangsaan menjadi landasan dalam menjalankan tugas dan fungsi, termasuk dalam lingkup legislatif. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis sebagai penyusun kebijakan daerah yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai kebangsaan yang menjadi pedoman hidup bersama.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin global, pemahaman terhadap wawasan kebangsaan menjadi semakin relevan dan urgent untuk diperkokoh guna menghadapi berbagai tantangan sosial, politik, dan ekonomi yang berpotensi memecah belah bangsa (Kurniawaty & Widayatmo, 2024). Implementasi nilai-nilai empat konsensus ini sering kali menghadapi berbagai hambatan, baik dalam tataran pemahaman maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari (Ikbal & Sunarno, 2023). Dalam konteks tugas DPRD, penguatan nilai-nilai ini menjadi semakin penting untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap berpijak pada semangat persatuan dan keadilan.

Upaya memperkuat persatuan bangsa, nilai-nilai Empat Konsensus Nasional yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal

Ika menjadi pedoman dasar yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip persatuan dalam keragaman, semuanya memiliki relevansi yang sangat besar dalam membangun jati diri bangsa Indonesia yang majemuk (Aminullah, 2023). Namun, meskipun nilai-nilai tersebut terkandung dalam struktur hukum dan kebijakan negara, pemahaman yang mendalam dan penerapannya di kalangan masyarakat belum sepenuhnya maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya sosialisasi yang sistematis dan menyeluruh untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memahami, menghayati, dan mengimplementasikannya.

Beberapa pengabdian sebelumnya yang relevan telah dilakukan oleh (Isabella, 2018) dimana hasil pengabdianannya menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh DPR, MPR, dan DPRD berhasil memberikan kontribusi positif terhadap ketahanan nasional. Keberhasilan ini tercermin dari berbagai langkah yang telah diambil untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, terutama generasi muda, tentang nilai-nilai kebangsaan. Ada juga (Sudewi et al., 2023), dimana hasil pengabdianannya menyoroti upaya memperkuat ketahanan ideologi Pancasila di tengah problematika ideologis yang melanda Indonesia. Problematika ini mencakup lemahnya pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, yang membuat mereka rentan terhadap ancaman internal maupun eksternal yang berpotensi merusak integritas, identitas, dan keberlangsungan bangsa.

Melalui kegiatan pengabdian ini, masyarakat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, dengan tujuan menumbuhkan rasa nasionalisme serta memperkuat ketahanan ideologi sebagai fondasi bangsa. Hasil pengabdian berikutnya yaitu yang dilakukan oleh (Rajagukguk et al., 2023), dimana hasilnya menekankan pentingnya pemahaman dan penguatan wawasan kebangsaan bagi masyarakat, khususnya kelompok tani, sebagai upaya menumbuhkan sikap dan karakter nasionalisme. Melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi, disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan merupakan konsep mendasar yang mendorong kesadaran warga negara sebagai kekuatan bangsa. Sosialisasi ini bertujuan untuk membangkitkan rasa nasionalisme di kalangan petani, sehingga mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Gap pertama adalah terbatasnya fokus pada penguatan Empat Konsensus wawasan kebangsaan dalam kegiatan sosialisasi. Sebagian besar kegiatan pengabdian yang ada lebih fokus pada aspek ideologi Pancasila atau wawasan kebangsaan secara umum, tetapi belum secara spesifik mengaitkan dan mengintegrasikan keempat nilai tersebut secara komprehensif sebagai dasar konsensus nasional yang harus diperkuat di masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut cenderung terfokus pada satu atau dua aspek, seperti ideologi atau integritas, dan belum

membahas secara terperinci bagaimana nilai-nilai Empat Konsensus dapat saling memperkuat satu sama lain dalam menghadapi tantangan kebangsaan saat ini.

Selain itu, meskipun terdapat upaya sosialisasi wawasan kebangsaan pada generasi muda dan kelompok masyarakat tertentu, masih ada kebutuhan untuk memperluas cakupan dan memperdalam pemahaman mengenai relevansi nilai-nilai Empat Konsensus Nasional dalam konteks kehidupan sosial yang semakin kompleks. Misalnya, meskipun generasi muda diberi bekal wawasan kebangsaan, mereka sering kali tidak memahami bagaimana empat konsensus tersebut dapat diaplikasikan dalam interaksi sosial di tengah keberagaman dan dalam menghadapi isu-isu globalisasi serta radikalisme yang berkembang.

Pengabdian yang dilakukan dengan judul "Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Sebagai Upaya Penguatan Nilai-Nilai Empat Konsensus Nasional" menawarkan novelty dengan mengintegrasikan empat konsensus nasional dalam sebuah program sosialisasi yang lebih terstruktur dan holistik. Kegiatan ini tidak hanya akan memberikan pemahaman tentang Pancasila atau NKRI secara terpisah, tetapi juga akan memperkenalkan cara-cara untuk mengaplikasikan dan menguatkan keempat nilai ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dengan tujuan untuk membentuk ketahanan nasional yang lebih kokoh. Pendekatan ini akan melibatkan diskusi interaktif, ceramah, dan kegiatan berbasis partisipasi masyarakat yang memungkinkan para peserta memahami masing-masing nilai tersebut serta saling melengkapi dalam membentuk dasar yang kuat untuk menghadapi tantangan kebangsaan di era modern.

Selain itu, kegiatan ini mengangkat pentingnya pemahaman generasi muda terhadap Empat Konsensus Nasional sebagai elemen dasar dalam membentuk karakter dan identitas kebangsaan mereka, serta sebagai upaya preventif untuk menghindari penyebaran paham radikal dan intoleransi. Pengabdian ini juga melibatkan berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya terbatas pada kelompok generasi muda, tetapi juga melibatkan komunitas lain, termasuk kelompok petani, yang memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah kehidupan sosial yang heterogen. Dengan demikian, novelty dari pengabdian ini terletak pada pendekatan komprehensif yang melibatkan keempat nilai konsensus nasional secara bersama-sama, dengan metode yang beragam dan partisipatif, serta pada upaya mengedukasi masyarakat tentang relevansi nilai-nilai tersebut dalam menghadapi tantangan kontemporer di Indonesia.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan nilai-nilai Empat Konsensus Nasional, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan dasar ideologi dan identitas bangsa.

Secara spesifik, kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai tersebut, serta membantu masyarakat memahami relevansinya dalam hubungan antar kelompok yang memiliki latar belakang berbeda. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga dan memperkuat persatuan bangsa, sekaligus menumbuhkan rasa nasionalisme yang berbasis pada kebhinekaan.

## B. METODE

Pelaksanaan pengabdian ini menggunakan metode pelaksanaan Participatory Action Research (PAR), dimana pendekatan PAR merupakan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengumpulan data, analisis, dan tindakan (Cornish et al., 2023). Kegiatan ini berupa sosialisasi wawasan kebangsaan yang dilaksanakan melalui sosialisasi dan diskusi interaktif. Kegiatan ini melibatkan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Hj. Sulasih, S.Sos. dan Dr. H. Sobirin Bagus, M.M. sebagai narasumber 1 yang didampingi oleh Dr. Ramdanil Mubarak, S.Pd.I., M.M. sebagai narasumber 2. TIM Pengabdian dari STAI Sangatta Kutai Timur yang beranggotakan Siti Munfiatik, Eka Widyanti, dan Siti Nur Hasanah ikut berpartisipasi sebagai peserta dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

### 1. Tahapan Perencanaan (*Planning*)

Sebelum acara sosialisasi dilaksanakan, panitia bersama Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur serta narasumber melakukan diskusi dengan masyarakat setempat untuk mengidentifikasi isu-isu yang relevan terkait wawasan kebangsaan, seperti pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hasil dari diskusi ini digunakan sebagai dasar untuk merancang materi sosialisasi yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat.

Kemudian melakukan koordinasi dengan stakeholders, termasuk dengan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, tokoh masyarakat, dan instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Berikutnya, melakukan persiapan materi, dimana tim menyusun materi sosialisasi yang meliputi penjelasan tentang Empat Konsensus Nasional, tantangan implementasinya, dan relevansinya dalam kehidupan masyarakat saat ini.

Selain itu, panitia juga mempersiapkan berbagai alat partisipatif untuk mendukung keterlibatan aktif peserta, seperti formulir masukan, papan aspirasi, dan media interaktif berupa kartu diskusi kelompok. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan sosialisasi berlangsung secara inklusif dan produktif.

## 2. Pelaksanaan (*Action*)

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada hari minggu, 17 November 2024 di Agra Rasa (Eks. Mesfa Mulia), Jln. Yos Sudarso 3, RT.2, Teluk Lingga, Sangatta, Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Acara Sosialisasi dimulai sejak pukul 19.30 - Selesai. Sasaran kegiatan adalah perwakilan pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, dan tokoh masyarakat yang ada Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Kelompok ini dipilih untuk mewakili berbagai lapisan masyarakat yang berpotensi menjadi agen perubahan dalam penguatan wawasan kebangsaan.

Tahapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan dilaksanakan melalui tiga agenda utama, yaitu: pembukaan, pemaparan materi, dan diskusi. Acara pembukaan dimulai dengan MC membuka acara, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sambutan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, kemudian dilanjutkan pada penyampaian materi oleh narasumber, dan diskusi tanya jawab, dan ditutup dengan foto bersama

## 3. Tahap Evaluasi dan Tindak Lanjut (*Reflection and Follow-Up*)

Tim mengumpulkan kuesioner, hasil wawancara, dan catatan observasi untuk menilai efektivitas kegiatan. Data dianalisis untuk mengukur perubahan pengetahuan dan sikap peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Dan tindak lanjut dilakukan untuk memberikan rekomendasi kepada stakeholders terkait kegiatan serupa di masa depan dan menyusun laporan akhir untuk mendokumentasikan hasil kegiatan ini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi wawasan kebangsaan sebagai upaya penguatan nilai-nilai empat konsensus nasional bersama Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur merupakan agenda yang berkesinambungan. Sosialisasi ini akan dilaksanakan di tiga kabupaten yang berbeda, yaitu Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang, dan Kabupaten Berau. Agenda pertama sosialisasi ini dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur.

### 1. Pembukaan

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan terbagi menjadi tiga agenda utama, yaitu pembukaan, pemaparan materi, dan diskusi. Tahapan pembukaan diawali oleh pembawa acara (MC) yang membuka kegiatan secara resmi dengan menyapa para peserta dan menyampaikan susunan acara. Selanjutnya, seluruh peserta diajak untuk berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai simbol penghormatan terhadap nilai-nilai kebangsaan. Setelah itu, sambutan diberikan oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan

Timur yang mengapresiasi kehadiran peserta dan memberikan pengantar mengenai pentingnya sosialisasi ini dalam memperkuat wawasan kebangsaan.

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan, Ibu Hj. Sulasi, S.Sos. dalam sambutannya memberikan paparan pengantar tentang Empat Konsensus Nasional, perannya dalam menjaga integritas bangsa, serta tantangan yang dihadapi di Kalimantan Timur. Dilanjutkan dengan penyampaian materi yang mendalam tentang Empat Konsensus dalam wawasan kebangsaan. Penekanan pada relevansi nilai-nilai kebangsaan dalam menghadapi tantangan modern, seperti keberagaman, ancaman disintegrasi, dan pengaruh globalisasi. Setelah rangkaian pembukaan selesai, acara sosialisasi wawasan kebangsaan dilanjutkan pada penyampaian materi oleh kedua pemateri. Sebelum penyampaian materi, terlebih dahulu moderator memberikan pengantar dan membacakan Curriculum Vitae kedua Narasumber.



Gambar 1: Acara Pembukaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

## 2. Pelaksanaan

### a. Penyampaian Materi Narasumber Pertama

Pada tahap pemaparan materi, narasumber menyampaikan materi inti yang meliputi pemahaman terhadap empat konsensus dalam bingkai wawasan kebangsaan. Penyampaian materi ini dirancang secara interaktif untuk menginternalisasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari



Gambar 2: Narasumber Pertama Dr. H. Sobirin Bagus, MM. Menyampaikan Materi

Narasumber pertama, Dr. H. Sobirin Bagus, M.M., membuka sesi dengan memberikan gambaran global tentang dunia yang terdiri dari berbagai benua, seperti Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Australia, dan Eropa. Dalam penjelasannya, ia menguraikan bagaimana di setiap benua terdapat berbagai macam negara dengan sistem pemerintahan dan budaya yang beragam. Penjelasan ini bertujuan memberikan konteks global sebelum membahas posisi Indonesia dengan keempat konsensus nasionalnya.

Saat memasuki pembahasan tentang Indonesia, Dr. Sobirin menggunakan pendekatan dialektis dengan menghubungkan keempat konsensus nasional tersebut Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Penyampaian materi dilakukan dengan gaya yang humoris, komunikatif, dan partisipatif sehingga peserta tetap antusias dan mudah memahami isi materi. Untuk membantu peserta menghafal keempat konsensus nasional, ia menciptakan singkatan kreatif "PBNU," yaitu P itu Pancasila, B itu Bhinneka Tunggal Ika, N itu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan U itu Undang-Undang Dasar 1945.



Gambar 3: Peserta Sosialisasi Mendengarkan Paparan Narasumber

Selanjutnya, Dr. Sobirin mengaitkan nilai-nilai dalam keempat konsensus nasional dengan ajaran Islam, baik melalui ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits, hingga pada prinsip-prinsip hukum Islam (*Qawaidul Fiqhiyyah*). Ia menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila, dari sila pertama hingga kelima, serta prinsip-prinsip dalam UUD 1945, tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam (Naufal & Ryshakti, 2023). Dengan memberikan landasan syar'i, narasumber menegaskan bahwa empat konsensus nasional adalah bagian integral dari identitas bangsa yang dapat diinternalisasi oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk umat Islam. Penjelasan ini memberikan keyakinan kepada peserta bahwa nilai-nilai kebangsaan selaras dengan nilai-nilai keagamaan.

#### b. Penyampaian Materi Narasumber Kedua

Narasumber kedua Dr. Ramdanil Mubarak, S.Pd.I., M.M. mengawali uraiannya dengan memberikan prolog bahwa sosialisasi wawasan kebangsaan yang kita lakukan malam ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara memberikan panduan nilai bernegara. UUD NKRI 1945, sebagai konstitusi, menjadi pedoman hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara (Hasan et al., 2024). NKRI menegaskan komitmen terhadap bentuk negara kesatuan yang menjaga keutuhan wilayah dari Sabang sampai Merauke. Sementara itu, Bhinneka Tunggal Ika merepresentasikan semangat keberagaman dalam persatuan, yang mengakui perbedaan sebagai kekayaan bangsa, bukan sumber konflik (Dzauharoh & Saputra, 2023).



**Gambar 4:** Narasumber Kedua Dr. Ramdanil Mubarak Menyampaikan Materi

Narasumber kedua memaparkan data-data penelitian maupun data hasil survei berkaitan dengan wawasan kebangsaan, dimana data dari Populix pada tahun 2023 merilis bahwa 65% anak muda mengalami penurunan jiwa Nasionalismenya (Tanip, 2023). Rinciannya adalah Gen Z sebesar 64%, Milenial 67% dan Gen X sebesar 61%. Adapun faktornya menurut (Tanip, 2023) adalah 71% adalah Media Sosial, pengaruh globalisasi (60% responden); pengaruh nilai budaya (56% responden); perubahan sosial dan teknologi (52% responden); kesenjangan sosial ekonomi (44% responden); ketidaktahuan sejarah (43% responden); kurangnya pendidikan patriotism (43% responden); krisis kepemimpinan (35% responden); dan komsumerisme berlebihan (28% responden).

Data Berikutnya adalah 83% siswa SMA menganggap Pancasila bukan Ideologi permanen dan bisa diganti (Astungoro, 2023) dalam berita Republika. Pada tahun 2022, Berita Satu mempublikasikan hasil survei yang dilakukan oleh SMRC terkait tingkat pemahaman masyarakat terhadap Pancasila. Survei tersebut menunjukkan bahwa 95,4% responden mengaku mengetahui Pancasila. Namun, ketika diminta untuk menyebutkan seluruh sila dengan benar, hanya 64,6% yang mampu melakukannya. Sebanyak 10,2% responden dapat menyebutkan empat sila dengan benar, 5,1% menyebutkan tiga sila, dan 3,9% mampu menyebutkan dua atau satu sila dengan benar. Sementara itu, 12,3% responden tidak dapat menyebutkan satu pun sila dengan benar. (Paat, 2022).

Sampai pada data Radikalisme di Kalimantan Timur, dimana data yang dipublikasikan oleh BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) Provinsi Kalimantan Timur bahwa pada tahun 2021. Terdapat 199 potensi radikalisme di Kaltim. Karenanya, dalam rangka penanggulangan paham radikalisme, maka perlu melakukan deradikalisasi melalui pendekatan humanis dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi wawasan

kebangsaan. Program pembinaan dan sosialisasi dilaksanakan secara berkesinambungan untuk lebih memudahkan berhasilnya pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan.

Temuan BRIDA memberikan masukan bagi pemerintah bersama DPRD Kalimantan Timur untuk segera berbenah dan menyusun Raperda sampai pada pengesahaanya sebagai upaya penanggulangan radikalisme. Maka lahirlah Perda No. 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pancasila dan wawasan kebangsaan yang akan mengatur berbagai aspek terkait materi, sasaran, dan metode pelaksanaannya. Materi ini juga dilengkapi dengan muatan lokal yang mencakup budaya daerah serta lagu nasional dan daerah. Pasal 8 menetapkan bahwa sasaran pendidikan ini mencakup berbagai kelompok, mulai dari siswa, organisasi politik; maupun organisasi kemasyarakatan. Mulai dari ASN; guru dan tenaga kependidikan; serta tokoh agama dan adat. Untuk metode pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 11, pendidikan ini dilakukan melalui berbagai cara, yaitu salah satunya adalah sosialisasi (Yusuf, 2023).

Berdasarkan pemaparan data yang telah diuraikan oleh Narasumber maka perlunya DPRD Provinsi mengambil peran untuk terus melakukan sosialisasi berdasarkan Perda yang telah disahkan dan menjalankan fungsi sosialisasi baik pada Wawasan kebangsaan, keragaman, maupun Bela Negara.

### DPRD PROVINSI KALTIM MENGAMBIL PERAN SOSIALISASI



**Gambar 5:** Peran DPRD Provinsi Kalimantan Timur

#### 1) Wawasan Kebangsaan

Merupakan cara pandang yang menempatkan hubungan hukum antara individu dan negara sebagai dasar utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Konsep ini menuntut seluruh bangsa untuk mengutamakan kepentingan dan keselamatan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan (Maksudi, 2023). Juga mendorong penguatan persatuan Indonesia dengan tetap menjunjung asas

Bhinneka Tunggal Ika serta menolak segala upaya yang berpotensi memecah belah bangsa. Dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup, Wawasan Kebangsaan telah membimbing Indonesia menjalankan misinya di tengah dinamika kehidupan global.

## 2) Keberagaman

Keberagaman merujuk pada kondisi di mana terdapat berbagai perbedaan yang ada dalam suatu kelompok atau masyarakat, baik dalam aspek budaya, agama, suku, bahasa, adat istiadat, maupun pandangan hidup. Keberagaman budaya mencakup perbedaan dalam tradisi, seni, dan cara hidup yang diterapkan oleh setiap kelompok masyarakat, yang bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya (Saraswati & Manalu, 2023). Perbedaan agama mengacu pada berbagai keyakinan dan ajaran spiritual yang dianut oleh individu atau kelompok, yang membentuk cara mereka menjalani kehidupan dan berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Keberagaman suku dan bahasa mencerminkan keanekaragaman etnis dan bahasa yang digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat yang ada di dalam suatu wilayah, masing-masing dengan ciri khas yang unik (Riyadi et al., 2024).

Adat istiadat, sebagai bagian dari keberagaman, meliputi aturan atau kebiasaan. Sementara itu, perbedaan pandangan hidup mencerminkan cara berpikir, nilai, dan prinsip yang dipegang oleh individu atau kelompok dalam memandang kehidupan, baik itu secara filosofis, sosial, maupun politik (Febrianty et al., 2023). Keberagaman ini menjadi sumber kekayaan yang bisa memperkaya kehidupan masyarakat, tetapi juga memerlukan pengelolaan yang bijak agar tetap tercipta keharmonisan, toleransi, dan saling pengertian antar individu dan kelompok yang berbeda.

Kalimantan Timur merupakan provinsi yang kaya akan keberagaman, baik dalam aspek suku, agama, budaya, maupun bahasa. Keberagaman suku di Kalimantan Timur sangat mencolok, dengan dihuni oleh berbagai suku bangsa seperti Dayak, Bugis, Banjar, Jawa, Melayu, dan Tionghoa (Al Aidhi & Reza, 2023). Masing-masing suku memiliki adat istiadat, bahasa, dan tradisi yang khas, namun mereka hidup berdampingan dengan harmonis di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman agama di Kalimantan Timur juga sangat terlihat, seperti pemeluk agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu (Muthohar & Masykhur, 2020). Selain itu, keberagaman budaya dan bahasa juga menjadi ciri khas Kalimantan Timur, dengan berbagai bahasa daerah yang digunakan

oleh masyarakat, seperti Bahasa Dayak, Bahasa Kutai, Bahasa Bugis, dan Bahasa Banjar (Zaka, 2024). Keanekaragaman ini menjadikan Kalimantan Timur sebagai provinsi yang kaya akan budaya, yang memperkaya kehidupan sosial dan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

### 3) Bela Negara

Bela Negara dan Wajib Militer memiliki dasar yang sama, yaitu melindungi eksistensi negara, tetapi keduanya berbeda dalam konsep dan pelaksanaannya. Wajib Militer adalah kewajiban bagi warga negara untuk menjalani pelatihan militer, dan biasanya diterapkan saat negara dalam kondisi darurat, seperti saat terjadi perang (Prasetyo et al., 2021). Dalam situasi tersebut, rakyat sipil yang telah terlatih akan diterjunkan untuk mendukung kepentingan militer, seperti yang diterapkan di negara-negara seperti Korea Selatan, Singapura, dan Belanda, yang memiliki kebijakan wajib militer untuk menjaga keamanan negara mereka. Sementara itu, Bela Negara tidak terbatas pada kewajiban militer, tetapi lebih menekankan pada sikap dan kesadaran seluruh warga negara untuk berperan aktif dalam menjaga dan mempertahankan eksistensi suatu bangsa. Bela Negara mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, baik dalam bentuk partisipasi aktif dalam kegiatan yang mendukung negara, maupun dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, tanpa harus terlibat dalam tindakan militer langsung (Agustini et al., 2024).

Selain itu, fungsi bela negara sangat penting untuk mempertahankan eksistensi, keutuhan, dan kedaulatan negara, serta menjaga stabilitas nasional dan melindungi bangsa dari ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Fungsi bela negara meliputi penjagaan keutuhan wilayah, pertahanan negara dari ancaman, sebagai panggilan sejarah, dan kewajiban setiap negara (Akbar et al., 2024).



**Gambar 6:** Narasumber Menyampaikan Materi tentang Pearan DPRD Provinsi Kalimantan Timur

DPRD Provinsi perlu mengambil peran aktif dalam melakukan sosialisasi berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) yang telah disahkan untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Perda tersebut dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh DPRD sangat penting dalam mengedukasi masyarakat tentang wawasan kebangsaan, keberagaman, serta bela negara. Melalui sosialisasi ini, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta menghargai keberagaman suku, agama, dan budaya yang ada. Selain itu, dengan adanya sosialisasi terkait bela negara, warga negara akan lebih menyadari hak dan kewajiban mereka dalam mempertahankan negara, baik secara fisik maupun dalam konteks sosial dan budaya.

Sosialisasi yang dilakukan oleh DPRD juga akan memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan menjaga ketertiban serta stabilitas nasional. Hal ini berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih inklusif, toleran, dan peduli terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, peran DPRD dalam sosialisasi sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan pentingnya wawasan kebangsaan dan bela negara demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. DPRD Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab penting dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dalam hal kebebasan beragama, DPRD bertanggung jawab melindungi hak setiap individu untuk menjalankan ajaran dan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, selama tidak bertentangan dengan peraturan, serta menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.

### c. Diskusi Taya Jawab

Selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber, termasuk anggota DPRD, tokoh masyarakat, atau akademisi yang terlibat dalam kegiatan. Fokus pada membahas kendala yang dihadapi masyarakat dalam menerapkan nilai kebangsaan serta mencari solusi bersama. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat pemahaman peserta tentang pentingnya Empat Konsensus Nasional dalam kehidupan sehari-hari.



**Gambar 7:** Sesi Diskusi dan Tanya Jawab

### D. KESIMPULAN

Acara Sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan, menunjukkan pentingnya penguatan nilai-nilai Empat Konsensus Nasional sebagai dasar kebangsaan yang kokoh. Acara ini menghadirkan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, tokoh masyarakat, dan akademisi yang menyampaikan materi mengenai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Melalui diskusi interaktif, peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan berbagi pandangan mengenai kendala yang dihadapi dalam menerapkan nilai kebangsaan di kehidupan sehari-hari. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga persatuan, kesatuan, serta keberagaman yang ada, dengan berlandaskan pada Empat Konsensus Nasional. Diharapkan, acara ini dapat memperkuat komitmen bersama dalam melaksanakan nilai-nilai kebangsaan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berwawasan kebangsaan yang tinggi.

## E. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada: Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang telah mengundang kami sebagai narasumber dan berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian mengenai implementasi nilai-nilai Empat Konsensus Nasional. Para tokoh masyarakat, akademisi, dan narasumber yang telah berbagi wawasan mendalam terkait Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Seluruh peserta yang antusias mengikuti acara, berdiskusi, dan berbagi pandangan dalam membangun pemahaman kebangsaan yang kokoh. Kami berharap kerja sama dan dukungan ini terus berlanjut di masa mendatang. Terima kasih atas kehadiran, semangat, dan dedikasi semua pihak yang terlibat. Semoga apa yang telah kita lakukan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, D., Astuti, D. A., & Suryani, I. (2024). Persepektif Masyarakat Terhadap Peran Bela Negara Dalam Menjaga Kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 4(2), 176–186. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i2.3251>
- Akbar, R. S., Ashari, H. A. A., Suharsono, J. P., Ramadanti, G., Apriansyah, M. R., Sulistiyawan, H., & Triandeda, K. D. (2024). Urgensi Pendidikan Bela Negara di Era Society 5.0 (Tantangan dan Peluang). *Journal on Education*, 6(4), 19343–19354. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.5868>
- Al Aidhi, A., & Reza, F. (2023). Pelestarian Budaya dan Adat Kutai ke Generasi Muda Melalui Pergelaran Seni. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Lamin*, 2(1), 8–15.
- Aminullah, A. (2023). Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Serta Tantangan Dan Solusinya. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 8(2), 408–423. <https://doi.org/10.58258/jupe.v8i2.5366>
- Ardiansyah, M. N., Sari, D. N., Putri, D. C. M., Hamasa, Q. S., Arya, Y., & Ghozali, I. (2024). Pentingnya Peranan Generasi Muda Sebagai Garda Terdepan Dalam Mewujudkan Kedaulatan Negara Dengan Berlandaskan Pancasila. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 148–160. <https://doi.org/10.3342/jkepmas.v1i2.133>
- Astungkoro, R. (2023). Survei Setara: 83,3 Persen Siswa SMA Anggap Pancasila Bisa Diganti. *Republika*. <https://news.republika.co.id/berita/ruop0d436/survei-setara-833-persen-siswa-sma-anggap-pancasila-bisa-diganti>
- Cornish, F., Breton, N., Moreno-Tabarez, U., Delgado, J., Rua, M., de-Graft Aikins, A., & Hodgetts, D. (2023). Participatory Action Research. *Nature Reviews Methods Primers*, 3(1), 34. <https://doi.org/10.1038/s43586-023-00214-1>
- Dzauharoh, S., & Saputra, G. W. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila pada Generasi Milenial di Era Modern. *Public Administration And Development Journal*, 1(1), 34–39. <https://doi.org/10.59223/padj.v1i1.10>
- Febrianty, Y., Pitoyo, D., Masri, F. A., Anggreni, M. A., & Abidin, Z. (2023). Peran Kearifan Lokal Dalam Membangun Identitas Budaya Dan Kebangsaan. *El-Hekam*, 7(1), 168–181. <https://doi.org/10.31958/jeh.v7i1.10591>
- Fitrianto, Y. (2021, November 10). Cegah Radikalisme, Balitbangda Provinsi Kaltim Gelar FGD Kajian Penyebaran Paham Radikalisme Di Provinsi Kalimantan Timur. *BRIDA KALTIM*. <https://brida.kaltimprov.go.id/artikel/cegah-radikalisme-balitbangda-provinsi-kaltim-gelar-fgd-kajian-penyebaran-paham-radikalisme-di-provinsi-kalimantan-timur>
- Hasan, Z., Putri, F. G., Riani, C. J., & Evandra, A. P. (2024). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 138–150.

<https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1863>

- Ikbal, A., & Sunarno, A. (2023). Integrasi Nilai-Nilai Kebangsaan: Suatu Metode Pembelajaran Dalam Menangkal Radikalisme. *Jurnal Paris Langkis*, 3(2), 107–118. <https://doi.org/10.37304/paris.v3i2.8470>
- Isabella, I. (2018). Sosialisasi Wawasan Kebangsaan sebagai Upaya Penguatan Ketahanan Nasional Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 3(1). <https://doi.org/10.36982/jpg.v3i1.661>
- Karimullah, S. S. (2021). Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman Berbasis Wawasan Kebangsaan Dalam Sistem Pendidikan. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 3(2), 66–74. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v3i2.983>
- Kurniawaty, J. B., & Widayatmo, S. (2024). Nasionalisme Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Bagi Generasi Z Indonesia. *JAGADDHITA: Jurnal Kebhinnekaan Dan Wawasan Kebangsaan*, 3(2), 42–50. <https://doi.org/10.30998/jagaddhita.v3i2.3039>
- Maksudi, E. I. (2023). Wawasan Kebangsaan Prasyarat Terjaganya Persatuan-Kesatuan Bangsa Dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Seminar Nasional Filsafat Teologi*, 38–48.
- Muthohar, A., & Masykhur, A. (2020). Islam Dayak: Dialektika Identitas Dayak Tidung dalam relasi Sosial-agama di Kalimantan Timur. *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, 11(1), 1–32.
- Muzakkir, M., & Dani, A. U. (2020). Analisis Nilai-Nilai Kebangsaan Dan Kebhinnekaan Di Madrasah Madani Alauddin Makassar. *Inspiratif Pendidikan*, 9(2), 1–17. <https://doi.org/10.24252/ip.v9i2.14938>
- Naufal, M. A., & Ryshakti, A. (2023). Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Dalam Perspektif Islam. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(4), 204–214. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i4.555>
- Paat. (2022). Survei SMRC: Hanya 64,6% Publik Hafal Semua Sila Pancasila. *Berita Satu*. <https://www.beritasatu.com/nasional/934451/survei-smrc-hanya-646-publik-hafal-semua-sila-pancasila>
- Prasetyo, D., Manik, T. S., & Riyanti, D. (2021). Konseptualisasi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Upaya Bela Negara. *Jurnal Pancasila Dan Bela Negara*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.31315/jpbn.v1i1.4382>
- Rajagukguk, J., Gulo, T., Gea, S. D. N., & Lumbantobing, A. N. (2023). Sosialisasi Penguatan Dan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Pada Masyarakat Kelompok Tani Terpadu Martubung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 2658–2662. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i3.1522>
- Riyadi, I., Prabowo, E. A., & Hakim, D. (2024). Peran Bhinneka Tunggal Ika Dalam Keberagaman Adat Budaya di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(3), 34–49. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i3.1870>
- Saraswati, L. G., & Manalu, A. G. B. (2023). Rekognisi Keragaman Budaya dan Multikulturalisme Bhineka Tunggal Ika. *Krtha Bhayangkara*, 17(2), 273–296. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i2.802>
- Sudewi, S., Andoyo, A., & Ipnuwati, S. (2023). Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan. *Jurnal PkM Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 13–21. <https://doi.org/10.56327/jurnalpkm.v4i1.81>
- Tanip, I. (2023). Dampak Media Sosial terhadap Jiwa Nasionalisme Anak Muda. *Populix*. <https://info.populix.co/articles/nasionalisme-anak-muda/>
- Wiratmoko, D., & Fahrudi, E. Z. (2017). Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Sebagai Wujud Integritas Generasi Muda. *Journal of Social Empowerment*, 2(1), 126–130.
- Yusuf, R. (2023). *Pemprov Kaltim Bersama DPRD Sahkan Perda Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan*. Diskominfo Prov. Kalimantan Timur. <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/pemerintahan/pemprov-kaltim-bersama-dprd-sahkan-perda-penyelenggaraan-pendidikan-pancasila-dan-wawasan-kebangsaan>
- Zaka, I. (2024). Penggunaan Bahasa di Ruang Publik Kota Samarinda. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 9088–9097. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.9534>